

Optimalisasai Program Beasiswa Sepuluh sarjana Per Desa dalam Mencetak Generasi Unggul di Kabupaten Bojonegoro

Wahidah Nazilatul Maghfiroh¹, Sri Minarti²

¹Program Studi PAI Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro

²Fakultas Tarbiyah Dan Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro

nazilatulmghfrh10@gmail.com¹, minarti@unugiri.ac.id²

Article Info

Article history:

Received April 26, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 24, 2026

Keywords:

Optimization; Ten

Undergraduate Scholarship

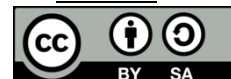
Program per Village;

Bojonegoro Regency

ABSTRACT

DTKS, Bojonegoro. Bojonegoro Regency is one of the areas in East Java that has experienced a significant increase due to income from natural gas. Of course, there are quite a lot of oil companies in Bojonegoro Regency and have a total APBD which is mostly sourced from oil and natural gas. However, the human development index in Bojonegoro Regency is still relatively low due to the low quality of education in Bojonegoro Regency. Therefore, to overcome this problem, the government is providing a Scholarship Program for Ten Undergraduates Per Village which is expected to increase people's interest in continuing their education to a higher level. This research aims to find out a general picture of how the process of implementing the ten undergraduate scholarship program per village in Bojonegoro Regency takes place. The results of this research indicate that the implementation of the ten undergraduate scholarship program has been carried out in accordance with standard operating procedures with the provisions of Regent's Regulation Number 17 of 2023 concerning the Ten Undergraduate Scholarship Program per Village. Even though there are several problems in its implementation, this program has had a good and positive impact on increasing human resources and achieving the human development index in Bojonegoro Regency.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 26, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 24, 2026

Keywords:

Optimalisasi; Program

Beasiswa Sepuluh Sarjana

per Desa; Kabupaten

Bojonegoro

ABSTRAK

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan pendapatan dari gas alam, tentunya perusahaan minyak di Kabupaten Bojonegoro cukup banyak dan memiliki total APBD yang sebagian besar bersumber dari minyak dan gas alam. Akan tetapi, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong rendah dikarenakan rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa yang diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang bagaimana proses pelaksanaan program beasiswa sepuluh sarjana per desa di Kabupaten Bojonegoro berlangsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program beasiswa sepuluh sarjana telah berjalan sesuai dengan prosedur operasi standar dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 17

Tahun 2023 tentang Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa. Meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, namun program ini telah memberikan dampak yang baik dan positif terhadap peningkatan sumber daya manusia dan pencapaian indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Wahidah Nazilatul Maghfiroh
Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro
E-mail: nazilatulmgfhrh10@gmail.com

Pendahuluan

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, terutama di sektor pertanian dan migas (minyak dan gas bumi) (Situs Resmi Pemkab Bojonegoro). Bojonegoro memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Perlu diketahui bahwasannya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang memiliki total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 7,4 triliun yang menempati posisi tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Surabaya (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro). Jika dilihat dari indeks pembangunan manusia dengan APBD sebesar itu bisa dikatakan jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Bojonegoro masih cukup rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain dengan APBD dibawah Kabupaten Bojonegoro (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, 2024).

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan bahwa, Pengaruh sektor migas (minyak dan gas bumi) di Bojonegoro terhadap pendidikan cukup signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. yaitu dapat meningkatkan dana Pendidikan dana bagi hasil migas (DBH Migas) yang diterima oleh Bojonegoro digunakan sebagian untuk sektor pendidikan. Ini bisa mencakup pembangunan sekolah, beasiswa, hingga peningkatan fasilitas belajar. Banyak program beasiswa diberikan kepada pelajar dan mahasiswa Bojonegoro dari pemerintah daerah maupun perusahaan migas (seperti ExxonMobil) melalui program CSR. Ada juga pelatihan keterampilan atau vokasi untuk siswa SMK yang disesuaikan dengan kebutuhan industri migas. Pengaruh sektor migas dapat meningkatkan Infrastruktur Pendidikan Pendapatan dari sektor migas memungkinkan perbaikan atau pembangunan gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas teknologi (Dwi Retno Ariyanti, 2013).

Termasuk Kabupaten Bojonegoro, disparitas Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan global dan mewujudkan kemajuan daerah. namun, di berbagai wilayah Indonesia, pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi isu krusial. Keterbatasan ekonomi, akses informasi, dan infrastruktur seringkali menjadi penghalang bagi generasi muda di desa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi karena berbagai kendala, terutama dari segi ekonomi. Oleh karena itu, beasiswa menjadi

salah satu solusi penting untuk mendukung pemerataan akses pendidikan dan mendorong generasi muda meraih cita-citanya (Elsa Andhita Sari, 2024).

Karena sejatinya, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan beradab. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi di Indonesia masih belum merata, khususnya di daerah pedesaan. Kabupaten Bojonegoro, dengan jumlah desa yang mencapai lebih dari 400 desa, menghadapi tantangan besar dalam menyediakan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh warganya. Banyak anak muda di desa yang memiliki potensi akademik tinggi namun terhambat oleh kondisi ekonomi dan kurangnya dukungan. Kondisi ini tidak hanya membatasi peluang individu untuk berkembang, tetapi juga berpotensi menghambat kemajuan dan daya saing daerah secara keseluruhan (Badan Pusat Statistik Bojonegoro, 2024).

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro yang ditampilkan pada situs Satu Data Bojonegoro, grafik menunjukkan perkembangan angka putus sekolah (drop out) per tahun dari tahun 2017 hingga 2024. Angka putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2019, yang berada di kisaran 0,22% hingga 0,24%. Setelah itu, terjadi penurunan signifikan pada tahun berikutnya, dengan angka yang terus menurun hingga mencapai 0,00% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang tercatat putus sekolah pada tahun tersebut, yang merupakan pencapaian positif dalam dunia pendidikan di Bojonegoro. Secara umum, ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan akses serta keberlanjutan pendidikan bagi seluruh siswa.

Keterbatasan ekonomi dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat serta saling memengaruhi dalam jangka pendek maupun panjang. Kemiskinan seringkali menjadi salah satu hambatan utama bagi individu maupun keluarga untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan juga memperbesar kemungkinan seseorang untuk tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Investasi pada sektor pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu, menjadi langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui peningkatan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan, masyarakat dapat dibekali dengan keterampilan, pengetahuan, serta daya saing yang lebih baik di dunia kerja. Dengan demikian, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup, membangun masa depan yang lebih cerah, dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Miftahul Fauzan, 2023).

Pada tahun 2024, Kabupaten Bojonegoro mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup tinggi, yaitu 72,75%. IPM ini mencerminkan peningkatan dalam aspek usia harapan hidup, pengetahuan, serta standar hidup layak bagi masyarakat Bojonegoro. Namun, meskipun IPM Bojonegoro berada dalam kategori tinggi, sektor pendidikan masih memerlukan perhatian lebih. Hal ini tercermin dalam angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang hanya mencapai 7,59 tahun, setara dengan tingkat pendidikan kelas 8 SMP. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi untuk memastikan setiap warga Bojonegoro memiliki akses terhadap pendidikan yang lebih baik (Badan Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2024).

Menjawab permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meluncurkan program Beasiswa "Sepuluh Sarjana Per desa" sebagai bentuk nyata intervensi dalam meningkatkan

akses pendidikan tinggi. Dengan memberikan beasiswa penuh kepada calon mahasiswa dari desa khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki potensi akademik. Untuk mencetak generasi muda Bojonegoro yang unggul, berpendidikan tinggi, mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat, wawasan luas, dan komitmen untuk berkontribusi aktif dalam memajukan daerahnya. Program ini bukan hanya sekadar memberikan bantuan finansial, program ini merupakan bentuk invertensi pemerintah daerah dalam meningkatkan akses Pendidikan tinggi dan mencetak generasi muda yang cerdas berdaya saing global. Serta dirancang sebagai solusi pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan (Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2024).

Sebagai garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, pemerintah memiliki amanah yang besar untuk memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan haknya atas pendidikan. Landasan hukum dan kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai pilar kemajuan mendorong pemerintah untuk hadir melalui berbagai program kebijakan yang bertujuan untuk membantu serta membiayai proses pendidikan seluruh anak bangsa (Kusnandar, 2018; Nurhayati & Yuliani, 2022). Inisiatif ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Di tingkat daerah, komitmen untuk memajukan pendidikan juga tercermin dalam langkah-langkah konkret. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, misalnya, menyadari betul bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Lukiswati, Pemkab Bojonegoro memiliki serangkaian program beasiswa yang dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan kebutuhan pendidikan.

Salah satu program yang menarik perhatian adalah Beasiswa Scientist, sebuah inisiatif yang kemungkinan besar ditujukan untuk mendorong lahirnya generasi ilmuwan dan peneliti muda dari Bojonegoro. Program ini ditujukan untuk mahasiswa berprestasi di bidang sains dan teknologi. Selain itu, terdapat program 10 Sarjana Perdesa, sebuah terobosan yang sangat inovatif dan memiliki dampak langsung pada pembangunan di tingkat desa. Tak ketinggalan, Pemkab Bojonegoro juga memiliki program Beasiswa Tugas Akhir. Program ini menunjukkan pemahaman yang mendalam akan tantangan yang dihadapi mahasiswa di tingkat akhir studi. Menyelesaikan tugas akhir seringkali membutuhkan sumber daya finansial tambahan untuk penelitian, penulisan, dan penjiwaan. Dengan adanya beasiswa ini, diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu tanpa terkendala masalah biaya (Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, 2024).

Sekretaris Dinas Pendidikan Bojonegoro, Lukiswati, mengatakan, Melalui program-program beasiswa yang beragam ini, Pemkab Bojonegoro tidak hanya memberikan bantuan finansial semata, tetapi juga menanamkan harapan dan membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih impian mereka melalui pendidikan. Inisiatif ini adalah contoh nyata bagaimana kebijakan pendidikan di tingkat daerah dapat menjadi motor penggerak kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan harapannya terkait program beasiswa dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Kamis (6/3/2025). Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa program beasiswa ini

diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Bojonegoro, menciptakan generasi yang lebih berkualitas, serta menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pernyataan ini disampaikan dalam rangka peluncuran program beasiswa daerah yang menjadi salah satu agenda prioritas Pemkab Bojonegoro untuk mendukung pembangunan daerah yang makmur dan membanggakan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung program ini, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kalangan, khususnya keluarga prasejahtera yang membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan. Melalui program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa ini, pemerintah kabupaten Bojonegoro tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas Pendidikan, tetapi juga mendorong pemerataan kesempatan belajar sebagai bentuk keadilan sosial. Program ini memberikan beasiswa penuh kepada minimal 10 anak muda dari setiap desa agar dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat sarjana. Dalam jangka panjang, program beasiswa ini diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan solusi pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan memberikan kesempatan pendidikan yang setara, program Beasiswa "Sepuluh Sarjana per desa" diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi disparitas pendidikan, memberdayakan masyarakat desa, dan Ultimately, mendorong pembangunan Kabupaten Bojonegoro yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Akan tetapi berdasarkan informasi yang di temukan di lapangan memperlihatkan bahwa akses masyarakat terhadap beasiswa ini belum optimal, terhambat oleh masalah administrasi ataupun kriteria prestasi yang disyaratkan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa biaya.

Penelitian artikel bertujuan untuk menggali secara mendalam latar belakang, pelaksanaan, serta potensi strategis dari program beasiswa "Sepuluh Sarjana per Desa" sebagai solusi pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan. Program ini dipandang sebagai salah satu langkah visioner dalam membentuk generasi unggul di Kabupaten Bojonegoro. Dengan menelaah implementasinya dari berbagai sudut pandang, diharapkan artikel ini mampu memberikan kontribusi pemikiran yang berarti dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan pendidikan berbasis pemerataan dan keberlanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) sebagai landasan utama, di mana peneliti menelaah secara mendalam terhadap jurnal-jurnal nasional dan sumber-sumber referensi yang memiliki reputasi baik serta dapat dipercaya keakuratannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan proses penyelidikan yang bertujuan untuk memahami permasalahan sosial melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata maupun angka, serta menyampaikan pandangan para informan secara rinci dan jelas dalam bentuk tulisan ilmiah.

Metode ini dinilai fleksibel karena mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang berubah-ubah. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti berupaya mengungkap bagaimana

dan mengapa kebijakan tata kelola lingkungan masih belum terselesaikan hingga saat ini. Oleh sebab itu, metode kualitatif dengan analisis deskriptif dipandang mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji, karena menekankan pada kehati-hatian dalam proses penelitian serta memperhatikan sudut pandang subjek. Dasar teori digunakan sebagai pedoman agar fokus penelitian tetap sesuai dengan kondisi riil yang ada (Creswell, 1991:34).

Penelitian Deskriptif kualitatif dipilih untuk menyelidiki implementasi Program Penyaluran Beasiswa Berkualitas bagi mahasiswa di Kabupaten Bojonegoro. Metode ini dipandang relevan untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap isu sosial atau kemanusiaan yang menjadi fokus penelitian.

Dalam proses analisis, peneliti menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai referensi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai program beasiswa “Sepuluh Sarjana per Desa”. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk narasi yang disertai kutipan langsung dari literatur, serta dirujuk pada data sekunder yang tersedia dari lembaga atau peneliti sebelumnya, guna memperkuat argumentasi dan validitas temuan dalam penelitian ini. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan peneliti untuk memaparkan implementasi program beasiswa di Kabupaten Bojonegoro sebagai kebijakan pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode ini, peneliti bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa dijalankan dan dampaknya bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi di Kabupaten Bojonegoro.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), sehingga tidak dilakukan secara langsung di lokasi lapangan tertentu, melainkan melalui penelaahan berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dan data sekunder yang relevan serta terpercaya. Meskipun demikian, fokus kajian penelitian ini adalah pada implementasi program beasiswa di wilayah Kabupaten Bojonegoro, sehingga seluruh data dan pembahasan mengacu pada kondisi dan kebijakan yang berlaku di daerah tersebut. Adapun waktu penelitian tidak disebutkan secara spesifik, namun berdasarkan sumber data dan referensi yang digunakan, penelitian ini diperkirakan berlangsung dalam rentang tahun 2024 hingga 2025, serta diselesaikan sebelum publikasi artikel pada Januari 2026.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode studi pustaka (*library research*). Data sekunder tersebut berasal dari berbagai sumber yang relevan dan memiliki kredibilitas, antara lain jurnal ilmiah nasional, buku referensi, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi dari lembaga terkait. Penelitian ini juga memanfaatkan data yang bersumber dari instansi pemerintah seperti Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program beasiswa di Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu, sumber data dalam penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta informasi yang diperoleh dari situs resmi pemerintah daerah dan publikasi media yang relevan. Seluruh data yang digunakan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, serta mengidentifikasi berbagai referensi seperti jurnal ilmiah nasional, buku, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan implementasi program beasiswa. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti laporan instansi pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan di **Kabupaten Bojonegoro**. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dengan teknik ini, peneliti mampu memperoleh data yang komprehensif dan mendalam tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

[Pengumpulan Data] → [Kondensasi Data] → [Penyajian Data] → [Penarikan Kesimpulan]

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Peneliti memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa, serta mengeliminasi data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Data yang telah diseleksi kemudian diringkas dan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis lebih lanjut. Proses kondensasi ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung guna memperoleh data yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kajian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Data yang telah dikondensasi kemudian dikelompokkan berdasarkan tema atau aspek yang diteliti, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penyajian data juga didukung oleh kutipan dari berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperkuat analisis. Selain itu, pada bagian tertentu, data disajikan dalam bentuk tabel guna memperjelas informasi yang bersifat kuantitatif sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasikan seluruh data yang telah dianalisis secara menyeluruh sehingga diperoleh temuan utama penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa. Sementara itu, proses verifikasi dilakukan dengan

membandingkan berbagai sumber data serta melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang digunakan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keabsahan, konsistensi, dan validitas data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

a. Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa Bagi Mahasiswa Di Kabupaten Bojonegoro.

Program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa merupakan bantuan dana yang diberikan untuk mendukung biaya pendidikan, yang ditujukan khususnya bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per desa telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun di Kabupaten Bojonegoro, Program Sepuluh Sarjana Per desa diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Berhasilnya program ini dalam meningkatkan jumlah sarjana, maka diharapkan masyarakat mampu lebih mandiri dengan bekal ilmu yang telah dimilikinya, sehingga turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Awal mulanya program ini bernama beasiswa dua sarjana perdesa yang diatur dalam Perbup Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi namun saat ini telah mengalami perubahan sebanyak empat kali yaitu perubahan pertama dengan Perbup Nomor 15 Tahun 2020 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, kedua Perbup Nomor 33 Tahun 2020 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, ketiga Perbup Nomor 52 Tahun 2021 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, dan perubahan yang keempat adalah Perbup Nomor 17 Tahun 2023 tentang Beasiswa Sepuluh Sarjana Perdesa di Kabupaten Bojonegoro yang masih digunakan sampai dengan saat ini (Linda & Sri Kasiami,(2024).

Program beasiswa ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap pentingnya pendidikan. Program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan, sekaligus menjadi upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan. Dengan adanya beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa, masyarakat di Kabupaten Bojonegoro diharapkan tidak lagi menjadikan keterbatasan biaya sebagai alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan.

Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan jenjang perguruan tinggi. Beasiswa ini ditujukan untuk mendorong mahasiswa berprestasi dan bisa memperoleh pendidikan tinggi dengan mudah. Tuter Sekretaris Dinas Pendidikan, Lukiswati mengatakan “Pembuka akses yang seluas-luasnya kepada warga Bojonegoro yang sedang menempuh pendidikan tinggi untuk mendapatkan program beasiswa,”

Program Beasiswa ini memiliki tahapan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Secara umum, pendaftaran biasanya dibuka dua kali dalam setahun, dengan tahap pertama di awal tahun dan tahap kedua di pertengahan tahun. Di tahun 2025, pendaftaran tahap pertama dibuka selama satu bulan, yaitu dari 17 Januari hingga 17 Februari. Berikut adalah tahapan umum dalam pendaftaran Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa:

1. Pendaftaran dan Pengisian Formulir: Mahasiswa yang memenuhi syarat akan mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran secara daring atau offline sesuai dengan ketentuan yang diumumkan oleh Pemkab Bojonegoro.
2. Pengumpulan Berkas: Mahasiswa wajib mengumpulkan berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan, seperti fotokopi ijazah, transkrip nilai, surat keterangan dari kampus, dan dokumen pendukung lainnya.
3. Seleksi Berkas: Tim seleksi dari Pemkab Bojonegoro akan menyeleksi berkas-berkas yang telah dikumpulkan untuk menentukan siapa saja yang memenuhi syarat dan akan melanjutkan ke tahap selanjutnya.
4. Pengumuman Hasil Seleksi: Hasil seleksi berkas akan diumumkan, dan mahasiswa yang lolos akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tahapan selanjutnya.
5. Verifikasi dan Pencairan Dana: Mahasiswa yang lolos akan diminta untuk melakukan verifikasi data dan mendapatkan pencairan dana beasiswa sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendanaan program beasiswa ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyelenggaraan program beasiswa ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen pemerintahan, mulai dari Bupati, anggota dewan, hingga seluruh jajaran di Dinas Pendidikan. Pemkab Bojonegoro memiliki tujuan dilaksanakannya program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa tersebut adalah:

- a) Meningkatkan dan mendorong partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan tinggi.
- b) Meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro
- c) Memperkaya potensi lokal, salah satunya dengan mencetak generasi muda yang lebih terdidik dan berkualitas
- d) Mengurangi angka putus sekolah setelah jenjang SMA karena kendala biaya

Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per desa Di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Adapun keempat teori tersebut adalah sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi memegang peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan akan efektif jika para pengambil keputusan memahami tugas mereka, yang hanya bisa dicapai melalui penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan konsisten menyusun rencana komunikasi, termasuk jadwal pengumuman, pengingat waktu, dan pembaruan informasi terkait proses seleksi.

Pertama, dinas terkait menyusun rencana komunikasi yang mencakup jadwal dan jenis komunikasi yang diperlukan termasuk penjadwallan pengumuman beasiswa, pengingat tanggal/waktu, serta update informasi terkait proses seleksi dan pelaksanaan. Maka dari itu pihak penyelenggara dapat memastikan bahwa semua informasi telah tersampaikan dengan waktu yang tepat dan akurat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi yaitu miss komunikasi yang terjadi antara pihak desa/pemerintah desa dengan masyarakatnya. Hal ini dibuktikan bahwa pihak dinas pendidikan selaku penyelenggara beasiswa menyatakan bahwa sudah mensosialisasikan dengan cara mengirim surat ke pemerintah desa/Kecamatan yang ada di bojonegoro. Selanjutnya untuk menjangkau hal tersebut pihak dinas menyediakan saluran komunikasi seperti media social, email termasuk situs web resmi yang secara khusus sudah dibuat pesan otomatis untuk menjawab pertanyaan yang dikirimkan. dapat disimpulkan bahawa system komunikasi yang dijalankan antara pihak penyelenggara dan penerima besiswa sudah baik dengan adanya pelayan yang disediakan dengan maksimal. Salah satu bentuk komunikasi yang diterapkan adalah melalui penyebaran suarat ke setiap desa/kecamatan dan memanfaatkan media sosial.

2. Sumber Daya

Jika para pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat maupun untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sumber daya dalam program beasiswa ini dapat ditinjau dari kompetensi yang dimilikinya, mencakup sumber daya manusia, dana, serta fasilitas dan infrastruktur yang mendukung keberlangsungan program Beasiswa Sepuluh Sarjana Perdesa. Berdasarkan informasi tersebut, dinas terkait telah memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola aspek sumber daya manusia dalam program ini. Sebelumnya, program ini dikenal dengan nama Beasiswa Satu Desa Dua Sarjana, namun seiring meningkatnya jumlah pendaftar yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, pemerintah memutuskan untuk mengganti nama program sekaligus menambah kuota penerima beasiswa dari dua menjadi sepuluh orang per desa. Oleh karena itu, program ini kini disebut Beasiswa Sepuluh Sarjana Per desa.

Tabel 1. Dana Anggaran & Serapan Anggaran beasiswa

Tahun	Anggaran	Serapan
2020	23,6 Milyar	1 Milyar
2021	23,4 Milyar	2,2 Milyar
2022	23,1 Milyar	5 Milyar
2023	23,8 Milyar	14 Milyar
2024	34,6 Milyar	13 Milyar
2025	34,6 Milyar	

Sumber: dinas Pendidikan kabupaten Bojonegoro 2024

3. Disposisi/Sikap

Faktor ketiga yang memengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Disposisi, yang merujuk pada sikap para pelaksana kebijakan, merupakan elemen penting dalam pendekatan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Disposisi dari para pelaksana kebijakan terhadap Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Perdesa, termasuk komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis dari pihak pemerintah, sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan kualitas pelaksanaan program tersebut. Diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Pendidikan telah memberikan standar pelayanan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menjalankan program beasiswa ini. Seluruh proses pelayanan dilakukan dengan baik, serta menunjukkan komitmen dan tanggung jawab masing-masing pihak. Serta adanya disposisi yang positif dari aparat Dinas Pendidikan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, turut mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Meskipun sumber daya yang dibutuhkan tersedia dan para pelaksana kebijakan memahami tugas mereka serta memiliki kemauan untuk bertindak, implementasi kebijakan tetap berisiko gagal atau tidak terealisasi akibat adanya kendala dalam struktur birokrasi itu sendiri.

Struktur organisasi birokrasi yang tertata dengan baik di tingkat kabupaten, termasuk adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Perdesa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Pendidikan telah memiliki SOP yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program beasiswa tersebut. Keberadaan SOP ini memungkinkan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan SOP dari Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Perdesa:

- a) Mahasiswa S1 yang masih aktif kuliah.
- b) Lulusan SMA sederajat di kabupaten Bojonegoro
- c) Berusia 20 tahun saat diterima sebagai mahasiswa dan tidak berstatus sebagai karyawan swasta.
- d) Memiliki IPK minimal 2,75 sejak semester pertama.
- e) Mahasiswa bagian dari Keluarga pemegang Kartu PKH, KIP, Kartu Petani Mandiri (KPM) Atau memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan.
- f) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.

b. Evaluasi Kinerja Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai hasil yang didapat setelah kebijakan dilaksanakan, serta mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan yang dapat dilakukan Perbaikan di masa mendatang (Adhayanto et al., 2019). menemukan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan, dalam proses kebijakan program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro juga ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan diantaranya:

1. Banyaknya Persyaratan yang diberikan kepada Penerima Beasiswa

Banyaknya persyaratan dalam pengajuan beasiswa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini tentu berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ini lantaran hanya sedikit pendaftar beasiswa yang bisa lolos kualifikasi. Tidak terpenuhinya kuota beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa menjadikan anggaran yang telah disiapkan untuk program ini hanya dapat sedikit mengalami serapan.

2. Keterlambatan Pengumpulan Berkas Penerima Beasiswa

Keterlambatan pengumpulan berkas-berkas persyaratan penerima beasiswa berakibat pada proses pencairan dana beasiswa yang seringkali mengalami keterlambatan. Meskipun Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro telah memberikan batas waktu pengumpulan berkas, namun batas waktu lama yang telah diberikan tidak menjadikan jika penerima beasiswa segera mengumpulkan berkas Persyaratan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

3. Inkonsistensi Pencairan Dana Beasiswa Setiap Tahunnya

Tahap pencairan dana beasiswa merupakan penyaluran dana dari Pemerintah Kabupaten kepada penerima beasiswa melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro kepada penerima beasiswa ke rekening masing-masing penerima beasiswa setiap semesternya yang diberikan secara *at cost*, sebagai pengganti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester yang telah dilalui sebelumnya. Pencairan dana beasiswa menjadi faktor utama yang dapat membantu mahasiswa dalam membiayai kebutuhan pendidikan Perguruan tinggi. Untuk itu, tahap pencairan dana beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketelntuan yang berlaku. Namun dalam proses pelaksanaannya pencairan dana beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa setiap tahunnya berjalan tidak konsisten.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Proses Seleksi Berkas Mahasiswa

Keterbatasan sumber daya dalam melakukan verifikasi data beasiswa juga menjadi salah satu faktor kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro. Tim validator berkas belasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa berjumlah 15 orang staf sekretariat yang terdiri dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Kasubbag umum dan semua staf umum. Mengingat banyaknya jumlah penerima beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa pada tahun 2023 mencapai 3800 penerima. Untuk memastikan program ini tepat sasaran maka diperlukan penyeleksian data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam verifikasi data. Proses penyeleksian administrasi program Belasiswa memerlukan waktu yang lama melihat jumlah penerima beasiswa dengan jumlah tim validator sangatlah tidak selimbang. Kurangnya sumber daya manusia dalam proses verifikasi data penerima beasiswa menyebabkan proses pengecekan berkas menjadi tidak efektif dan Efisien.

Kesimpulan

Program beasiswa sepuluh sarjana per desa merupakan bantuan finansial untuk biaya pendidikan, yang diprioritaskan bagi warga Kabupaten Bojonegoro yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sebelumnya, program ini bernama beasiswa dua sarjana dan mengalami sebanyak empat kali perubahan sehingga menjadi beasiswa sepuluh sarjana per desa.

Hasil penelitian dan analisis terhadap kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro berawal dari Perumusan munculnya masalah publik terkait rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia. Rekomendasi kebijakan yakni beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa yang mampu meningkatkan capaian IPM di Kabupaten Bojonegoro.

Secara keseluruhan, implementasi Kebijakan Program Beasiswa sepuluh sarjana per desa bagi mahasiswa di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program. Kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan Program beasiswa ini adalah Banyaknya persyaratan dalam pengajuan beasiswa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Serta keterlambatan pengumpulan berkas-berkas persyaratan penerima beasiswa berakibat pada proses pencairan beasiswa yang seringkali mengalami keterlambatan. Selain itu terdapat juga hambatan yaitu keterbatasan sumber daya dalam melakukan verifikasi data penerima beasiswa juga menjadi faktor kendala proses pelaksanaan kebijakan program beasiswa sepuluh sarjana per desa. Meski terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya, penerapan kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan IPM melalui angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bojonegoro.

Daftar Pustaka

- Andita, E., & Miftakhul, M. (2024). *Analisis kebijakan program beasiswa sepuluh sarjana per desa di kabupaten Bojonegoro*. CORE.
- Anas, F., & Sholikin, A. (2024). Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamongan*. *Jurnal Madani*, 7402.
- Ayu, F. P. (2024, Agustus 23). *Efektivitas beasiswa sepuluh sarjana per desa program pemkab Bojonegoro*. Kumparan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro 2024*. BPS Kabupaten Bojonegoro.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (2024). *Tingkatkan SDM, pemkab Bojonegoro kucurkan program beasiswa*. Kominfo Jatim.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Juknis program beasiswa pendidikan tinggi*. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. (n.d.). *Jenis program beasiswa pendidikan tinggi*. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
- Edo, Y. (2024). Disdik Bojonegoro: Penerima beasiswa pemkab Bojonegoro bertambah setiap tahun. *Radar Bojonegoro*.

- Edo, Y. (2025a). Beasiswa pemerintah kabupaten Bojonegoro 2025 dianggarkan Rp 34,6 M. *Radar Bojonegoro*.
- Edo, Y. (2025b). Pemerintah kabupaten Bojonegoro kembali anggarkan beasiswa pendidikan tahun 2025. *Radar Bojonegoro*.
- Fauzan, M. (2023). *Kesenjangan ekonomi yang berdampak pada pendidikan di Indonesia*. Kompasiana.
- Laily, E. N., & Kasmawanto, Z. (2022). Implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di perguruan tinggi swasta. *Google Scholar*.
- Linda, W., & Kasiami, S. (2025). Implementasi program beasiswa 10 sarjana per desa di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1148.
- P, M. A., Erison, Y., dkk. (2024). Implementasi program beasiswa pendidikan berkualitas dan gratis bagi mahasiswa Kabupaten Lamongan. *Jurnal Madani*, 9000.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Beasiswa sepuluh sarjana perdesa, pemkab Bojonegoro tingkatkan kualitas pendidikan, beri manfaat kurang mampu*. Portal Resmi Kabupaten Bojonegoro.
- Ramadhanty, A. W. (n.d.). *Efektivitas program dua sarjana satu desa bagi mahasiswa tidak mampu di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur* [Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. IPDN Institutional Repository.
- Retno, D., & Budi, E. (2013). Pengaruh sektor migas terhadap pengembangan Bojonegoro. *Jurnal Neliti*.
- Rohmah, E. N. L. (n.d.). Persepsi mahasiswa Bidikmisi Universitas Diponegoro terhadap harapan masa depan. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Sari, E. (n.d.). *Analisis kebijakan program beasiswa sepuluh sarjana per desa di Kabupaten Bojonegoro* [Undergraduate thesis, Universitas Bojonegoro]. Repository Universitas Bojonegoro.
- Sholikhin, A. (2018). Otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam (minyak bumi) di Kabupaten Bojonegoro. *Google Drive/Share*.
- Siswati, E. (2018). Analisis indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Sosioagribis*, 531.
- Yulianty, R. (2020). Kebijakan politik pemerintahan Bojonegoro dalam mengelola sumber daya alam minyak bumi. *Journal of Research*.